

## **BAB VI PENUTUP**

### **6.1 Kesimpulan**

Isu terkait HAM yang dialami oleh pekerja migran bukanlah hal yang asing dalam masyarakat. Salah satu yang menjadi akar permasalahannya adalah bagaimana negara-negara atau sebagian banyak populasi masyarakat dunia masih menganggap bahwa pekerja migran hanya sebatas entitas ekonomi yang kehadirannya tentu hanya berkaitan dengan perekonomian individu dan negara-negara yang bersangkutan. Pandangan-pandangan baru kemudian muncul mengenai perspektif dalam melihat pekerja migran dari sisi kemanusiaan. Pandangan ini memberikan pengertian baru bagi pekerja migran yang selain sebuah entitas ekonomi, mereka juga individu yang perlu dilindungi hak-hak hidupnya sama seperti warga negara lainnya. Keharmonisan akan kedua faktor tersebutlah yang masih menjadi polemik pelik di sekitar kita.

Kehadiran COVID-19 di tengah-tengah kita yang kemudian menjadi bencana global tentu bukan hal yang dapat dihindari oleh seluruh warga dunia. Permasalahan kesehatan bukanlah hal yang memiliki target mengingat virus ini dapat menyerang siapapun. Besarnya pengaruh dari COVID-19 terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat dunia kemudian memerlukan respon perlindungan yang sigap pula dari negara. Salah satu sektor yang tentu terpengaruh adalah sektor konstruksi yang kemudian dalam penelitian ini dikerucutkan fokusnya yaitu pada sektor konstruksi di Singapura. Pemintaan konstruksi yang turun akibat banyaknya perubahan protokol kerja yang mereka harus lakukan menyebabkan kesulitan tidak hanya sekedar pada dinamika sektor kerja konstruksi namun juga pada para pekerjanya. Singapura merupakan satu dari ratusan negara yang terdampak COVID-19, dan sebagai negara dengan reputasi yang cukup baik dalam hal teknologi hingga penertiban warganya tentu telah menjalankan kerja yang baik untuk melindungi warga negaranya dengan berbagai kebijakan yang dijalankan secara ketat dan disiplin. Namun kemudian dengan kemunculan berita mengenai tingginya angka kasus COVID-19 yang sebagian besar terdiri dari kasus yang berasal dari pekerja migran kemudian menimbulkan pertanyaan besar akan perlindungan mereka terhadap masyarakat selera menyeluruh.

Ariela Naomi Syifa

**Perlindungan Hak Pekerja Migran Sektor Konstruksi di Singapura Selama Masa Pandemi COVID-19 Tahun 2020**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional  
[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) - [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) - [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

Pekerja migran yang bertempat tinggal di asrama-asrama karantina mengeluhkan tentang kelayakan kehidupan mereka selama masa pencegahan penularan virus. Banyak bukti mengenai struktur kamar yang terlalu padat sehingga tidak sesuai dengan protokol pencegahan virus yang telah ditetapkan. Masalah lainnya adalah kurangnya kepekaan dalam hal medis terhadap pekerja migran sehingga diketahui banyak pekerja migran yang takut untuk pergi berkonsultasi dengan dokter akibat kuasa mereka yang dipegang oleh para pengusaha yang meperkerjakan mereka. Terbatasnya mobilitas para pekerja migran hingga akses informasi terhadap mereka yang sulit untuk didapatkan juga menambah parah keadaan yang tak tertangani di sektor pekerja migran Singapura. Hal ini kemudian memberikan cahaya yang terhadap sistem imigrasi yang dimiliki Singapura.

Sistem yang sangat kapitalis dimana jaminan hidup para pekerja migran disentralisasikan pada para pemberi pekerjaan mereka menjadi masalah yang memiliki pengaruh besar terhadap apa yang terjadi pada pekerja migran selama masa pandemi. Pada masa krisis kesehatan, seharusnya pelayanan kesehatan dilakukan secara merata dan tidak memilih-milih siapa yang harus dilindungi. Kurangnya inklusifitas pekerja migran dalam berbagai kebijakan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan migran menempatkan pekerja migran pada posisi yang sangat rentan akan ketidakadilan. Dalam hal COVID-19, kurangnya perhatian pemerintah Singapura terhadap pekerja migran nantinya dapat menjadi *boomerang* bagi negara tersebut. Virus dapat kembali menyebar dengan mereka membiarkan pekerja migran serba kekurangan dalam hal pelayanan kesehatan. Hal ini lah yang menyebabkan kehadiran NGOs atau kelompok-kelompok yang memiliki perhatian terhadap pekerja migran sangatlah penting.

Kelompok-kelompok non-pemerintah seperti HOME dan TW2C yang memiliki perhatian dalam hal pekerja migran dan advokasinya dalam menanggulangi hal ini selain memberi bantuan fisik seperti layanan kesehatan tambahan serta tempat tinggal sementara bagi yang harus kehilangan tempat tinggal lamanya akibat pemberhentian kepegawaian, juga secara aktif melakukan publikasi mengenai segala tantangan yang dihadapi pekerja migran selama masa pandemi COVID-19 baik bagi pekerja migran domestik, yang bekerja di sektor konstruksi, dan di sektor-sektor lainnya. Menyadari

Ariela Naomi Syifa

**Perlindungan Hak Pekerja Migran Sektor Konstruksi di Singapura Selama Masa Pandemi COVID-19 Tahun 2020**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional  
[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) - [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) - [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

permasalahan ini tidak hanya dapat diselesaikan secara domestik mengetahui kompleksnya kehadiran dari mereka serta menyadari banyaknya pihak yang bersangkutan, maka NGOs ini kemudian memperluas ranah diskusinya terhadap apa yang terjadi pada pekerja migran secara global. Hal ini kemudian membangun sebuah *Multi-track diplomacy* dalam hal perlindungan pekerja migran yang menghasilkan sebuah *guideline* yang berkaitan dengan standar yang perlu diterapkan oleh pemerintah dalam hal pemberkeraan pekerja migran di negaranya.

ILO sebagai organisasi internasional dalam hal ketenagakerjaan telah mengeluarkan berbagai rekomendasi serta panduan mengenai hal-hal yang perlu menjadi tindakan negara-negara asal maupun tujuan migrasi bagi perlindungan pekerja migran. Namun Singapura dalam penjalanannya belum cukup dalam menginklusikan pekerja migran dalam respon kebijakannya. Permasalahan ini kemudian terus bergulir hingga diskusi kemudian dilaksanakan melalui berbagai instrumen ASEAN yang memiliki fokus pada pekerja migran. Diselenggarakannya AFML yang menghadirkan negara-negara anggota, badan-badan ASEAN yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan migran, kelompok-kelompok NGOs, CSOs, serta organisasi-organisasi pengusaha dan pekerja untuk sama-sama mendiskusikan rekomendasi kebijakan akan hal perlindungan pekerja migran kemudian menjadi sebuah dorongan besar bagi Singapura untuk memperbaiki keadaan pekerja migran melalui pembuatan kebijakan yang lebih inklusif dan melindungi.

## 6.2 Saran

Permasalahan mengenai pelanggaran terhadap hak pekerja migran sudah seharusnya menjadi topik yang secara aktif dibahas oleh berbagai kalangan masyarakat. Kehidupan mereka yang berdampingan dengan masyarakat sekitar tentu mempengaruhi dinamika masyarakat di suatu wilayah. Hal lainnya adalah banyak pihak, termasuk negara, mencoba perlahan menggunakan perspektif HAM dalam melihat pekerja migran karena pada hakikatnya, pekerja migran adalah salah satu kontributor yang memajukan perekonomian bagi kedua negara yang bersangkutan. Dengan tumbuhnya perspektif ini, maka kesadaran untuk saling menjaga antara negara dan juga pekerja migran kelak akan meningkat sehingga dalam sebuah perumusan kebijakan, kebijakan tersebut kemudian

Ariela Naomi Syifa

**Perlindungan Hak Pekerja Migran Sektor Konstruksi di Singapura Selama Masa Pandemi COVID-19 Tahun 2020**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional  
[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) - [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) - [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

dapat turut melindungi para pekerja migran dalam menjalankan pekerjaannya di negara destinasi.

Kehadiran COVID-19 merupakan sebuah faktor besar terungkapnya pelanggaran yang terjadi di Singapura terhadap perlindungan hak pekerja migran. Hal yang perlu dipelajari adalah bahwa Singapura harus memperbaiki kebijakannya agar pekerja migran lebih terlibat di dalamnya. Krisis kesehatan yang terjadi saat ini kemudian menjadi salah satu indikator perlunya kesetaraan hak yang diterima baik oleh warga lokal maupun para pekerja migran tanpa membedakan level pendidikan, status sosial, maupun negara asalnya. Saran terakhir adalah kepedulian negara dalam menyetujui berbagai perjanjian untuk perlindungan pekerja migran karena dengan kebijakan yang bersifat lebih global, maka standarisasi dapat lebih terkendali dan pelanggaran akan lebih mudah dihindari.

Ariela Naomi Syifa

**Perlindungan Hak Pekerja Migran Sektor Konstruksi di Singapura Selama Masa Pandemi COVID-19 Tahun 2020**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional  
[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) - [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) - [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]